



MASYARAKAT MULTIKULTURAL dan DINAMIKA BUDAYA

**Dra. Suzy S. Azeharie, M.A., M.Phil.
Wulan Purnama Sari, S.I.Kom., M.Si.**



**MASYARAKAT
MULTIKULTURAL
dan
DINAMIKA BUDAYA**

MASYARAKAT MULTIKULTURAL dan DINAMIKA BUDAYA

**Dra. Suzy S. Azeharie, M.A., M.Phil.
Wulan Purnama Sari, S.I.Kom., M.Si.**



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Suzy S. Azeharie, Wulan Purnama Sari,

Masyarakat Multikultural dan Dinamika Budaya/Suzy S. Azeharie, Wulan Purnama Sari,
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2020.

xiv, 60 hlm., 23 cm.

ISBN 978-623-231-353-8

Hak cipta 2020, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2020.2574 RAJ

Dra. Suzy S. Azeharie, M.A., M.Phil.

Wulan Purnama Sari, S.I.Kom., M.Si.

MASYARAKAT MULTIKULTURAL DAN DINAMIKA BUDAYA

Cetakan ke-1, Februari 2020

Hak penerbitan pada PT Rajagrafindo Persada, Depok

Editor : Shara Nurachma

Setter : Raziv Gandhi

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwintanggung, No.112, Kel. Leuwintanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwintanggung No. 112, Kel. Leuwintanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162.
Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

Ucapan Terima Kasih

Ai Ching
Andia Elfika P.
Audrey Phelia
Chrisantya T E. A.
Christian Wicaksono
Cindy
Devin
Editha Mayliana Halim
Edward Tjahjadi
Ellyvia Josslyn
Evan Septian H.
Febby P. Oktavia
Fuad Abrar F.
Hendi Malik
Heru Chandra L.
Ivonne Madelene C.
Loula Lourdes Laurencia
Novi Tandriawan
Putri Michella
Stephen Jaufarry
Theo Triansa Wijaya
Theo Vrasandyka
Vicki Sofyan
Willen Tifany
Yolinda Destyana

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

PRAKATA

Dalam sebuah bus yang mengantar puluhan wisatawan asal Jakarta mengarungi Pulau Dewata, sang *guide* bercerita, “Kami orang Bali bekerja keras untuk *jinah*. Siang malam untuk *jinah*.” Sontak para wisatawan yang berada di dalam bus terperanjat. Wajah mereka khususnya wisatawan perempuan menganga tidak percaya. Masa sih orang Bali suka *jinah*? “Tidak usah kaget ibu bapak,” suara sang *guide* mengisi keheningan. “Kami di Bali menyebut ini *jinah*.” Seraya tersenyum ia mengeluarkan uang kertas beraneka warna. Suasana pun menjadi riuh dengan tawa. Cerita kata *jinah* di Bali ini mengingatkan kita bagaimana komunikasi tak sesederhana sebagai proses mengirim pesan dan menerima pesan. Di abad-21 ini bahkan kita menyaksikan bagaimana komunitas global saling bertukar produk sebagaimana ide dan nilai menjadi bagian kehidupan manusia (Tsuda, 1986). Pada awalnya, memang orang biasanya menganggap proses yang disebut komunikasi antarbudaya (*intercultural communication*) sebagaimana kisah *jinah* di Bali terjadi sebatas ketika bertatap muka (*face to face*) antara budaya yang berbeda. Dalam kenyataannya komunikasi antarbudaya menyentuh kehidupan manusia dalam banyak konteks dan keluasan yang di dalamnya termuat struktur kekuasaan yang bahkan tak kita sadari (Halualani, 2019:3).

Buku ini merupakan rangkuman dari mata kuliah Komunikasi Antarbudaya yang diajarkan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta. Dalam buku ini dipaparkan lebih lanjut bagaimana sebuah komunikasi antarbudaya dapat terjadi bila pemberi pesan termasuk anggota suatu budaya tertentu dan penerima pesan merupakan anggota budaya yang lain. Hal yang paling signifikan dan menjadi tanda komunikasi antarbudaya adalah baik sumber pesan maupun penerima pesan berasal dari budaya yang berbeda.

Di era dunia tanpa pagar batas ini mempelajari Komunikasi Antarbudaya makin penting. Apalagi Indonesia merupakan negara yang multikultur, yang dihuni oleh beragam suku, agama dan golongan.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat orang mudah berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, adalah contoh populer misalnya melalui bagaimana teknologi memudahkan terjadinya komunikasi antarbudaya. Bersamaan dengan itu pula mobilitas manusia yang semakin cepat juga ditunjang berbagai moda transportasi yang memudahkan orang berpergian ke berbagai penjuru dunia dan membuat persinggungan antarbudaya menjadi hal yang tak terelakkan.

Dengan mempelajari komunikasi antarbudaya, orang dapat mempelajari persamaan sekaligus perbedaan budaya. Memahami persamaan suatu budaya dapat membuat orang menjadi lebih dekat terhadap orang lain. Sementara itu, memahami perbedaan budaya mampu menolong orang mengetahui sumber-sumber masalah yang dapat terjadi.

Tidak dipungkiri bahwa perbedaan budaya dapat memicu terjadinya konflik. Berbagai konflik sektarian tercatat dalam sejarah Indonesia. Antara lain seperti, di Ambon dan Poso Sulawesi

Tengah pada awal tahun 1999 menjadi catatan hitam bagaimana keberagaman budaya Indonesia dinodai oleh ketidakmampuan sekelompok orang untuk menghargai perbedaan budaya yang ada.

Buku ini hadir untuk memperkenalkan berbagai aspek mengenai komunikasi antarbudaya dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Penulis berharap buku ini memberikan manfaat bagi mahasiswa, mahasiswi maupun berbagai pihak masyarakat umumnya yang ingin memahami persoalan komunikasi antarbudaya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam buku ini. Maka kritik, saran, dan masukan akan penulis terima sebagai suatu hal yang membangun dan berguna di masa mendatang.

Januari 2020,
Penulis

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 MASYARAKAT MULTIKULTURAL	1
A. Pengertian Masyarakat Multikultural	1
B. Ciri Masyarakat Multikultural	2
C. Terbentuknya Masyarakat Multikultural	2
D. Tantangan dalam Perbedaan Agama	3
E. Tantangan dalam Perbedaan Suku dan Etnis	4
BAB 2 POLA BUDAYA	7
A. Pola Budaya	7
B. Pola Budaya di Indonesia	9
C. High Context Culture dan Low Context Culture	10

BAB 3 HAKIKAT AGAMA	15
A. Nilai Agama	16
B. Fungsi Agama	17
C. Pluralitas Agama dan Hubungan Antar Agama	18
D. Konflik Karena Agama	19
BAB 4 IDENTITAS BUDAYA	23
A. Pengertian	23
B. Stereotip	25
C. Prasangka	27
BAB 5 KONFLIK, FACE NEGOTIATION THEORY DAN TINDAKAN PREVENTIF KOMUNIKASI	31
A. Pengertian Konflik	31
B. Penyelesaian Konflik	32
C. <i>Face Negotiation Theory</i>	33
D. Tindakan Preventif Konflik	34
BAB 6 KASUS KONFLIK DI INDONESIA	37
A. Konflik Antar Agama di Maluku	37
B. Konflik Sampit di Kalimantan	39
BAB 7 KEARIFAN LOKAL DI DAERAH DAN PENYELESAIAN KONFLIK	45
A. Pengertian Kearifan Lokal	45
B. Ciri-ciri dan Fungsi Kearifan Lokal	46
C. Contoh Kearifan Lokal di Daerah	48
D. Penyelesaian Konflik	49

BAB 8 PERAN PEMERINTAH DALAM MERAWAT KEBERAGAMAN DI INDONESIA	53
A. Pendahuluan	53
B. Peran Pemerintah	55
C. Kelembagaan	55
TENTANG PENULIS	59

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

1

MASYARAKAT MULTIKULTURAL

A. Pengertian Masyarakat Multikultural

Dalam kehidupan bermasyarakat, sering terdengar kata-kata “masyarakat multikultural”. Menurut Lawrence Blum dalam Lubis, multikulturalisme merupakan segala hal yang meliputi apresiasi, pemahaman, serta penilaian terhadap budaya seseorang dan penghormatan serta rasa keingintahuan mengenai budaya etnis dari orang lain. Masih dari sumber yang sama, Parekh menyebutkan bahwa multikultural adalah kesepakatan yang telah dibuat oleh masyarakat yang didasari atas rasa persatuan dengan mengesampingkan perbedaan seperti, perbedaan agama, politik, budaya, etnis, dan perbedaan yang lainnya (Lubis, 2006). Untuk Indonesia, beranekaragamnya suku, agama, ras, sosial budaya, dan gender merupakan realitas kehidupan yang tidak dapat dihindarkan. Perbedaan tersebut merupakan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

B. Ciri Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural memiliki beberapa karakteristik. Menurut pendapat Pierre L. Van den Berghe (1981), beberapa karakteristik dari masyarakat multikultural adalah:

1. Tersegmentasi dalam subkultur yang berbeda satu sama lain;
2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang bersifat nonkomplementer;
3. Kurang mengembangkan konsensus pada nilai-nilai dasar anggota masyarakatnya secara keseluruhan;
4. Sering kali terlibat konflik antarkelompok;
5. Secara tidak mutlak membangun integrasi sosial di atas paksaan atau karena adanya saling ketergantungan ekonomi;
6. Berada di bawah dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain.

C. Terbentuknya Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural di Indonesia dapat terbentuk bila: (1) konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya; (2) kesamaan pemahaman di antara para ahli mengenai makna multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya; dan (3) upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini (Suparlan, 2014).

Untuk mencapai terbentuknya masyarakat multikultural, harus dimulai dari pemahaman akan multikulturalisme yang bukan hanya sekadar mengakui yang berbeda, tetapi lebih merupakan penempatan perbedaan secara simetris (*symmetrical differentiated citizenship*). Perbedaan secara simetris berarti mengakui adanya pluralitas identitas dalam masyarakat atau dengan kata lain mengakui

adanya keberagaman dalam masyarakat. Melalui pengakuan terhadap pluralitas identitas, masyarakat tidak lagi terjebak pada isu-isu primordial dan/atau isu-isu sektarian yang bisa mengancam harmoni dalam kehidupan bersama (Arif, 2014).

D. Tantangan dalam Perbedaan Agama

Salah satu nilai penting bagi masyarakat timur menurut Hasan Sazali adalah agama. Agama merupakan suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan. Fungsi umum dari agama yaitu sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari dan mengatur perilaku-perilaku manusia. Peran agama menjadi sangat penting ketika agama telah dianut oleh kelompok-kelompok sosial manusia yang terkait dengan berbagai kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang kompleks dalam masyarakat (Sazali, 2016).

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keberagaman agama seperti, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu serta ratusan kepercayaan tradisional lainnya. Oleh karena itu, menurutnya, semakin besar keberagaman, semakin besar pula tantangannya. Tantangan dalam keberagaman umat beragama menjadi hal yang selalu ada di Indonesia.

Agama ada diperuntukkan bagi manusia dalam kehidupan, bukan sebaliknya manusia untuk agama. Ini artinya agama digunakan untuk mengantarkan manusia dalam kehidupan di dunianya dan mengantarkannya mempersiapkan kehidupannya di akhirat. Pengertian ini membawa konsekuensi bahwa kesadaran beragama bukan justru membengkungu manusia dalam fanatisme agama yang sempit dan terkesan ekstrem, tetapi membawa pada arah pembebasan manusia dari keterbelengguannya baik pada nilai agamanya sendiri maupun pada dunia materiil duniawi (Sazali, 2016).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan perbedaan keberagaman agama adalah toleransi beragama yang harus ada dalam masyarakat. Sikap toleransi dapat menghindarkan dari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat, seorang individu akan berhadapan dengan kelompok-kelompok yang berbeda dengannya seperti agama. Dengan demikian, toleransi beragama diperlukan untuk mengatasi perbedaan. Toleransi beragama merupakan sifat dan sikap saling menghargai antarumat beragama lain. Salah satu contoh toleransi antarumat beragama seperti, pemeluk agama Islam dan Kristen di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Joyodiningrat dan Masjid Al Hikmah, Serengan, Solo, Jawa Tengah yang tercipta sejak dulu (Digdoyo, 2018).

E. Tantangan dalam Perbedaan Suku dan Etnis

Karena Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia, negara ini rentan akan konflik horizontal. Konflik yang sering kali menjadi ancaman negara Indonesia berasal dari masyarakat, yaitu gerakan separatisme dan radikalisme yang mengakibatkan disintegrasi bangsa. Fenomena separatisme sempat terjadi dan mengancam keutuhan negara seperti, Gerakan Aceh Merdeka, Gerakan Republik Maluku Selatan, dan Operasi Papua Merdeka. Gerakan-gerakan tersebut menuntut untuk memisahkan kedaulatan dari negara Indonesia dan ingin mendirikan negara baru berdasarkan paham atau ideologi yang mereka ikuti (Sundawa, 2017).

Selain ancaman separatisme yang merupakan ancaman internal, terdapat juga ancaman eksternal yang berasal dari luar negeri. Ancaman tersebut merupakan dampak dari arus globalisasi yang masuk ke Indonesia. Arus globalisasi yang berdampak negatif dan menjadi ancaman dapat berupa tersebarnya paham-paham baru terutama dari Barat (*westernisasi*), degradasi moral, perubahan

pola pikir menjadi materialisme dan kebebasan tanpa batas (liberalisme). Globalisasi menyebabkan terjadi benturan antara negara di dunia. Bahkan Huntington meramalkan akan terjadinya benturan antarperadaban akibat faktor politik, sosial, budaya, ekonomi, ras, dan agama. Akibatnya, masyarakat telah mengalami pergeseran nilai dari yang tadinya berpusat pada hal yang spiritual ke masyarakat yang berpusat pada hal-hal materiil, serba konsumtif duniawi (Waruwu, 2010).

Daftar Pustaka

- Arif, Muhamad. 2014. "Model Kerukunan Sosial Pada Masyarakat Multikultural Cina Benteng (Kajian Historis Dan Sosiologis)". Diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK/article/view/1212/1086>.
- Diggoyo, Eko. 2018. "Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, Dan Tanggung Jawab Sosial Media". Diakses dari <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/734/672>.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2006. *Deskonstruksi Epistemologi Modern*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Sazali, Hasan. 2016. "Komunikasi Pembangunan Agama Dalam Membangun Toleransi Agama". Yogyakarta. Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. *Tesis Sekolah Pascasarjana: Universitas Gadjah Mada*.
- Sundawa, Dadang. 2017. "Penguatan Karakter Mahasiswa yang Berwawasan Kebangsaan Dalam Menghadapi Tantangan Disintegrasi Bangsa". Diakses dari <http://semnastafis.unimed.ac.id/wp-content/uploads/2017/11/07.-Dadang-Sundawa-Edit.pdf>.
- Suparlan, Parsudi. 2014. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural". Diakses dari <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewFile/3448/2729>.

Van den Berghe, Pierre L. 1981. *The Ethnic Phenomenon*. United Kingdom: Elsevier Science And Technology.

Waruwu, Fidelis. 2010. *Membangun Budaya Berbasis Nilai Panduan Pelatihan bagi Trainer*. Yogyakarta: Kanisius.

2

POLA BUDAYA

A. Pola Budaya

Konsep pola budaya atau *cultural pattern*, menurut Alo Liliweri (2003), diperkenalkan oleh Ruth Benedict. Menurut Benedict, kebudayaan merupakan cara-cara yang menjadi dasar kehidupan manusia yang ditampilkan melalui karakteristik kebudayaan yang unik. Di tempat lain, Oliver R. Goodenough (1996) mengatakan keunikan itu dimunculkan individu karena secara psikologis manusia dipengaruhi oleh sekelompok orang tertentu yang telah membuat konfigurasi itu sebagai sifat-sifat kebudayaan kelompok itu. Dasar teori ini adalah dalam diri manusia terdapat sistem memori budaya yang berguna untuk mengelaborasi rangsangan yang masuk (termasuk pola dan perilaku budaya) dari luar, yang menurut para penganut psikologi Gestalt, rangsangan dari luar itu diterima melalui sistem syaraf.

Transmisi kebudayaan materiil maupun nonmateriil bisa langsung dan tidak langsung. Transmisi langsung terjadi secara hereditas melalui perangai dan perilaku orang tua, misalnya dalam pola-pola budaya untuk menyatakan kegembiraan, kesedihan dan senyuman. Sedangkan transmisi tidak langsung terjadi melalui

media, misalnya radio, televisi, video, *tape recorder*, surat kabar, dan majalah. Pola-pola budaya, menurut Liliweri, tidak dapat dilihat atau dialami sebab pola-pola itu terdiri dari pikiran atau gagasan dan bahkan filosofi yang ada dalam akal manusia. Pola-pola budaya secara umum dibentuk oleh nilai, kepercayaan atau keyakinan, dan norma atau aturan (Liliweri, 2003).

Nikos A. Salingaros seperti yang dikutip Alo Liliweri (2003) menegaskan bahwa berdasarkan bantuan data-data statistik dibuat perbandingan unsur-unsur budaya antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Kemudian, dilihat manakah pola-pola yang relatif sama atau mungkin mengikuti satu sama lain. Temuan para ahli bahasa sungguh menarik, yaitu terdapat kesamaan pola budaya dalam semua kebudayaan, meskipun kebudayaan itu berbeda-beda. Pola-pola budaya itu mengandung unsur-unsur psikologi dan struktur

Sementara itu, Aryono Suryono dalam Kamus Antropologi (1982) mengemukakan bahwa pola budaya adalah rangkaian dari unsur-unsur yang menjadi ciri-ciri yang menonjol dari suatu kebudayaan dan dipakai untuk mendeskripsikan watak dari kebudayaan tersebut. Fungsi pola budaya menurut Liliweri adalah untuk mengenal pola perilaku, yaitu wujud yang mantap dari suatu rangkaian tampilan perilaku manusia atau golongan orang sehingga dapat dideskripsi dan bisa digunakan dalam relasi antarbudaya (Liliweri, 2003).

Masih menurut Liliweri, dari pemahaman terhadap pola budaya ini orang-orang dari kebudayaan tertentu menyusun pola berpikir, bercocok tanam, menangkap ikan, membuat tembikar, menenun, makan, dan minum. Sebagai contoh, jika ada istilah pada pemukiman, hal itu dimaksudkan sebagai lingkup persebaran daerah tempat tinggal penduduk menurut keadaan geografis tertentu seperti, pemukiman sepanjang pantai laut, sepanjang aliran sungai, sepanjang jalan, ataupun pemukiman yang terdiri dari rumah-rumah yang satu sama lain jauh letaknya karena tanah pertaniannya luas tetapi menggerombol (Liliweri, 2003).

Keterbukaan dan pergaulan antarbudaya juga dapat menghasilkan pertukaran antara pola-pola budaya yang didahului oleh pertukaran persepsi. Persepsi yang dipertukarkan itu membimbing tindakan orang ke dalam perilaku efektif kebudayaan orang itu sendiri. Sehingga bagaimana orang harus bertindak, bagaimana perilaku menghadapi dunia itulah yang diketahui merupakan pola-pola budaya.

B. Pola Budaya di Indonesia

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk kebudayaannya kerap terjadi konflik fisik antarkelompok dengan korban hingga ratusan orang. Oleh karena itu, pemahaman tentang pola-pola komunikasi antarsuku menjadi hal yang penting untuk disimak dengan teliti dan untuk dipahami dengan lebih baik (Putra, 2003).

1. Manusia, Simbol, dan Kebudayaan

Menurut Heddy Shri Ahimsa Putra, antarkebudayaan terdapat perbedaan antara tanda dan simbol. Satu simbol tertentu misalnya, hanya berarti dalam konteks tertentu. Dalam konteks bahasa, perbedaan antara fonem /t/ dan /th/ misalnya, hanya berarti dalam bahasa Jawa, karena fonem /th/ sangat bernilai. Lain misalnya dengan bahasa Bali, dalam bahasa ini perbedaan antara fonem /th/ dan /t/ tidak penting karena dalam bahasa Bali tidak ada fonem /t/. Bagi orang Bali tidak ada perbedaan yang penting antara /batuk/ dan /bathuk/. Sementara itu, bagi orang Jawa dua kata ini jelas menunjuk pada dua hal berbeda. Demikian juga kata /soto/ dan /sotho.

2. Komunikasi Antaretnis

Idealnya, menurut Putra, kelompok etnis berbeda dapat saling mengerti makna yang diberikan oleh masing-masing kelompok tentang ide, perilaku, dan benda yang ada di tengah kehidupan

mereka sehingga tidak terjadi perbedaan-perbedaan yang jauh dalam memberikan tafsiran dan tanggapan terhadap apa yang terjadi di lingkungan. Misalnya, kelompok Jawa yang tinggal di Papua idealnya mengetahui makna-makna yang diberikan oleh penduduk Papua terhadap lingkungan alam Papua, terhadap kehidupan masyarakat, sehingga tidak terjadi orang Jawa menilai penduduk setempat lebih rendah budayanya hanya karena mereka makan ubi, yang menurut pandangan orang Jawa memang bukan makanan yang berharga. Atau orang Madura yang tinggal di Kalimantan, mengetahui budaya masyarakat Dayak dan Melayu sehingga dapat lebih menghargai gaya hidup penduduk lokal dan tidak memandang rendah karena umumnya orang Dayak dan Melayu cenderung mengalah.

3. Salah Komunikasi

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan etnis dan kelompok, menurut Putra, menyimpan potensi konflik yang umumnya berakar pada salah paham yang muncul dari interaksi antara warga komunitas, pemeluk agama, atau suku bangsa yang berbeda. Dalam keberagaman budaya ini pemahaman atas berbagai macam bentuk komunikasi simbolik serta makna-makna simbol yang penting bagi suatu masyarakat, komunitas, atau suku bangsa merupakan salah satu modal penting untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik (Putra, 2003).

C. High Context Culture dan Low Context Culture

Low context communication menurut Gamsriegler (2005) merupakan sebuah cara atau sistem yang digunakan dalam sebuah komunikasi. *Low context communication* merupakan cara berkomunikasi saat makna dalam pesan bersifat eksplisit. Sifat eksplisit akan membuat penerima pesan lebih mudah menangkap makna arti pesan yang disampaikan. *Low context communication* merupakan sistem komunikasi yang diterapkan di negara seperti Amerika dan Jerman.

Umumnya ditemui pada budaya modern yang menginginkan komunikasi yang efektif, cepat, dan tepat.

High context communication berbeda dengan *low context* sebab *high context communication* merupakan komunikasi yang menggunakan penyampaian makna secara implisit. Edward Hall dalam Gamsriegler menyatakan bahwa dalam komunikasi konteks tinggi sebagian besar makna terletak pada konteks fisik atau nonverbal, yang meliputi ekspresi wajah, nada suara, dan gerak tubuh. Sebagai hasilnya, pesan itu sendiri membawa informasi kurang (Gamsriegler, 2005).

Dalam proses *high context communication*, komunikator melakukan komunikasi secara implisit dan bertele-tele hingga mampu membuat komunikasi menerjemahkan dan menangkap makna yang tepat. Komunikasi dengan cara ini digunakan untuk menjaga kesopanan, malu, atau untuk menguji sebuah ikatan. Tingkat efisiensi *high context communication* ini bergantung pada pemahaman intuitif komunikasi. Diperlukan waktu untuk menciptakan pemahaman yang sama antara pengirim dan penerima.

Penyampaian pesan secara *high context* bukan sekadar merangkai kata-kata menjadi kalimat sederhana, namun dibutuhkan konteks seperti, situasi yang sedang dihadapi, hubungan antara komunikator dan partisipan komunikasi, serta kepercayaan, nilai, dan norma budaya di antara partisipan. *High context* berkomunikasi dengan menekankan kesopanan, komunikasi nonverbal, frase yang tidak langsung atau *indirect phrasing*, biasanya untuk menghindari agar orang lain tidak tersakiti (Littlejohn, 2009).

Hall masih dari sumber yang sama menjelaskan bahwa konsep *high context* merujuk pada komunitas (organisasi) atau hubungan yang *family-type*, seperti keluarga (rumah tangga) dan di antara orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat. Menurut Alo Liliweri perbedaan budaya *high context* dan *low context* adalah sebagai berikut.

Pola Budaya *high context culture*:

1. Persepsi terhadap isu yang ada dan orang yang menyebarkan isu. Kadang-kadang isu dianggap benar tergantung dari siapa

yang mengatakannya. Bahkan seseorang akan menolak orang yang memberikan isu sekaligus menolak informasi yang diberikan.

2. Persepsi pada relasi tugas. Budaya HCC mengutamakan relasi sosial dalam melaksanakan tugas karena berorientasi pada orientasi sosial dan pada hubungan personal (*personal relations*).
3. Persepsi terhadap logis tidaknya informasi. Budaya HCC tidak menyukai sesuatu yang terlalu rasional, cenderung mengutamakan emosi dalam mengakses informasi dan lebih menyukai basa basi.
4. Persepsi terhadap gaya komunikasi dalam budaya HCC menggunakan gaya komunikasi tidak langsung, gaya komunikasi yang kurang formal dan mengutamakan dengan pesan nonverbal.
5. Persepsi terhadap pola negosiasi. Anggota masyarakat dalam budaya HCC mengutamakan perundingan yang mengutamakan faktor-faktor relasi antarmanusia dengan mengutamakan perasaan dan intuisi serta mengutamakan hati.
6. Persepsi terhadap informasi mengenai individu. Budaya HCC mengutamakan kehadiran individu dengan dukungan faktor sosial, mereka tidak memedulikan siapa dia, pekerjaan apa, benar salah, ahli atau tidak. Budaya HCC ini lebih mendengarkan loyalitas kelompoknya.
7. Bentuk pesannya sebagian besar merupakan pesan-pesan implisit yang tersembunyi.
8. Dalam melakukan reaksi terhadap sesuatu tidak selalu tampak.
9. Dalam memandang *in-group* (yang ada dalam kelompoknya) dan *out-group* (yang berada di luar kelompoknya) selalu luwes dalam melihat perbedaan.
10. Pertalian antarpribadinya sangat kuat.
11. Konsep terhadap waktunya sangat terbuka dan luwes (Liliweri, 2003).

Daftar Pustaka

- Gamsriegler, Angela. 2005. *High Context – And Low Context Communication*. New York: Doubleday Dell Publishing.
- Goodenough, Oliver. R. 1996. “Replication and the Evolution of Culture”. Diakses dari <https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/an.1996.37.1.10.2> pada tanggal
- Liliweri, Alo. 2003. *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: LKiS.
- Littlejohn, Stephen W. & Foss, Karen A. 2009. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 2003. “Pola Komunikasi Budaya Antaretnis Di Indonesia”. Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22100/14742> pada tanggal
- Suryono, Aryono. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Persindo.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

3

HAKIKAT AGAMA

Agama atau *religion* berasal dari bahasa Latin *religare* yang berarti “untuk mengikat”. Hal ini menandakan bahwa agama mengikat manusia dengan hal-hal sakral. Hal yang menarik dari agama adalah bahwa agama telah mengikat orang bersama-sama dalam dan memelihara cara pandang budaya mereka selama ribuan tahun. Agama dalam arti ‘klasik’ merupakan seperangkat aturan yang menata hubungan manusia dengan dunia gaib, khusus dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan lingkungan (Kresnowati, 2008).

Pengertian lain masih dari sumber yang sama menjelaskan bahwa agama adalah sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat yang menginterpretasi dan memberi respons terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Berdasarkan pengertian itu, agama sebagai suatu keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat menjadi norma dan nilai yang diyakini, dipercayai, diimani sebagai sesuatu referensi, karena norma dan nilai itu mempunyai fungsi tertentu dalam kehidupan sosial (Kresnowati, 2008).

A. Nilai Agama

Nilai agama adalah gabungan dari beberapa sistem yang mengatur tata perilaku, kepercayaan, dan kaidah dalam menjalani beragam contoh hubungan sosial antara sesama makhluk ciptaan-Nya, serta tata cara beribadah kepada Tuhan YME. Pembentukan nilai agama merupakan suatu upaya dalam pengembangan potensi dan pengetahuan individu mengenai ajaran yang bersumber dari firman Tuhan YME seperti akhlak dan akidah.

1. Pengertian Nilai Agama

Definisi nilai agama adalah segala bentuk peraturan hidup yang harus diterima oleh setiap manusia sebagai perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan, jika dilanggar akan mendapat siksa dari Tuhan di akhirat nanti (Sosiologi, 2019).

2. Ciri Nilai Agama

Adapun ciri-ciri dari nilai agama adalah:

- a. dapat memengaruhi pengembangan dalam diri di lingkungan sosial;
- b. memiliki pengaruh yang beragam dalam masyarakat;
- c. disosialisasikan sejak individu dilahirkan;
- d. sebuah konstruksi yang terbentuk melalui pedoman beragama yaitu kitab suci;
- e. disosialisasikan melalui beberapa macam proses sosial seperti kontak sosial dan interaksi sosial;
- f. saling berkaitan dengan nilai-nilai yang lainnya sehingga dapat membentuk pola dan sistem dalam masyarakat;
- g. keberadaannya mendarah daging (*internalize value*).

3. Faktor Pengaruh Pembentukan Nilai-Nilai Agama

Berikut merupakan faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan nilai agama dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut.

a. Faktor Keluarga

Definisi faktor keluarga merupakan institusi pertama dalam proses pendidikan seorang individu. Keluarga yang sangat religius memberikan dampak besar dalam pembentukan nilai agama dalam diri seorang individu. Artinya, tahap sosialisasi aspek ketuhanan dalam diri individu selalu dilakukan.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembentukan nilai-nilai agama dalam diri seorang individu. Dengan adanya pendidikan, individu dapat mengatur segala sikap dan tindakannya dalam bermasyarakat. Selain itu, pendidikan sangat berpengaruh dalam pembentukan jiwa religius individu.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sosial tempat individu menjalankan kehidupan sosialnya. Lingkungan termasuk dalam faktor yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam upaya pembentukan nilai-nilai agama pada individu.

B. Fungsi Agama

Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat karena agama memberikan sebuah sistem nilai yang memiliki derivasi pada norma-norma masyarakat untuk memberikan pengabsahan dan pemberian dalam mengatur pola perilaku manusia, baik di level individu dan masyarakat. Agama menjadi sebuah pedoman hidup singkatnya.

Secara garis besar ruang lingkup agama mencakup:

1. hubungan manusia dengan tuhannya;
2. hubungan manusia dengan manusia;
3. hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungannya.

Menurut Alo Liliweri yang dikutip oleh Winny Kresnowati (2008) fungsi agama dalam kompleksitas kehidupan masyarakat mengenai pemahaman bersama atas hal-hal sebagai berikut.

1. Fungsi edukatif. Fungsi ini tercermin dari nilai, ajaran, dan norma religius yang bersifat abstrak dengan tujuan membimbing umat manusia berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Pada transformasi-edukasi ini peranan para pemuka agama (kiai, ustad, ulama, pendeta, pastur, biksu, dan sebagainya) menempati posisi sentral.
2. Fungsi penyelamatan. Agama membahas tentang keselamatan di dunia dan akhirat. Dalam ajaran agama, manusia tidak saja mengejar kebahagiaan di dunia, tetapi juga mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di akhirat.
3. Fungsi pengawasan sosial. Agama akan kehilangan nilai etis dan sakralitasnya apabila dalam kenyataannya tidak mampu menjadi “pengawas” perilaku pada pemeluknya.
4. Fungsi memupuk persaudaraan. Agama apa pun pada dasarnya menjunjung tinggi humanisme (kemanusiaan) yang tercermin dari sikap persaudaraan.
5. Fungsi khusus agama. Menjalankan tugas dan fungsinya melalui pemeliharaan ciri khas, inkulturasikan dengan masyarakat dan budaya lokal. Misalnya, kesatuan unsur kesamaan darah, bahasa, dan daerah.

C. Pluralitas Agama dan Hubungan Antaragama

Hubungan antaragama di Indonesia telah lama menjadi perhatian serius masyarakat di dalam perilaku sosial, politik, dan budaya. Tata pergaulan sosial, politik, budaya di tengah masyarakat tak pernah lepas dari persoalan agama. Sudut pandang agama selalu menjadi kecenderungan masyarakat dalam merespons hubungan antaragama di Indonesia. Hal ini diakibatkan kemajemukan agama yang eksis dalam pergaulan masyarakat (Ahmad, 2016).

Pluralitas agama bisa dilihat sebagai kekayaan. Beberapa opsi untuk menjawab pluralitas keagamaan. *Pertama* adalah menerima kehadiran orang lain atas dasar konsep hidup berdampingan secara damai. *Kedua*, mengembangkan kerja sama sosial-keagamaan melalui berbagai kegiatan yang secara simbolik memerlukannya dan fungsional mendorong proses pengembangan kehidupan beragama yang rukun. *Ketiga*, mencari titik temu antara agama-agama untuk menjawab problem, tantangan dan keprihatinan umat manusia.

Falsafah hidup bangsa Indonesia yang terumus dalam Pancasila, yang sila pertamanya adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan alasan pertama bagi pemerintah bersama masyarakat untuk menciptakan suasana yang aman dan damai dalam membina kerukunan hidup beragama. Seluruh umat beragama menjadi unsur utama dari negara yang berdasar Pancasila. Agama harus menjiwai kehidupan bangsa dan memengaruhi sikap hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari.

Hubungan antarumat beragama sangat sulit terjaga karena adanya perbedaan sudut pandang maupun pola pikir yang dipengaruhi oleh keyakinannya masing-masing. Namun, dengan menjaga sikap untuk menghargai dan bertoleransi tinggi antarumat beragama dapat menciptakan kerukunan umat beragama.

D. Konflik Karena Agama

Menurut Kresnowiati (2008) suatu konflik yang disandarkan atas doktrin agama, sering kali sulit untuk diselesaikan karena di dalamnya menyangkut beberapa hal, yaitu:

1. ada gejala individu tidak bisa membedakan manakah kepentingan yang akan dia wakili dan kapan harus bertindak mewakili suku dan kapan sebagai seseorang dari agama tertentu;
2. ada gejala individu yang berasal dari beragam suku bangsa selalu merasa kelompoknya paling superior;

3. ada gejala individu melaksanakan proses komunikasi dengan standar dua muka, misalkan menjaga jarak sosial dan psikologis yang teraman dalam relasi dan komunikasi;
4. ada gejala individu gemar mendiskriminasi pihak lain karena perbedaan agama dan suku tertentu;
5. ada gejala individu selalu merasa curiga, berpikir negatif jika ada kelompok etnik lain berbuat lebih.

Menurut Alo Liliweli yang dikutip oleh Winny Kresnowati (2008), terdapat beberapa kekuatan yang belum dioptimalisasikan. Dengan tidak mengurangi peranan berbagai pranata hubungan antaragama yang telah ada, juga wadah konsultasi umat beragama, individu dapat menjadikan banyak hal sebagai kekuatan, misalnya:

1. menjadikan hubungan kekerabatan antarkeluarga dan rumah tangga serta komunitas sebagai wahana yang dapat bermanfaat bagi penyelesaian konflik atau kesalahpahaman yang terjadi di antara tokoh agama, tokoh agama dengan umat atau dengan pemerintah;
2. menjadikan aliansi-aliansi tradisional antarsuku bangsa sebagai wahana yang dapat digunakan sebagai penetrat konflik;
3. menjadikan hubungan-hubungan atas dasar profesi, spesialisasi akan bersifat universal sehingga meminimalkan perbedaan kepentingan antarumat beragama;
4. menjadikan hubungan antarpribadi dan kelompok dalam organisasi yang sifatnya lintas “interest”, misalnya dalam LSM yang berorientasi kepada usaha memecahkan masalah bersama, masalah kerakyatan;
5. menjadikan hubungan yang bersifat “emosional” melalui paguyuban, pengembangan seni dan budaya dan mungkin olahraga.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Rumadi. 2016. *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kresnowati, Winny. 2008. *Komunikasi Antarbudaya*. Jakarta: Jala Permata.
- Dosensoiologi. 2019. *Pengertian Nilai Agama, Ciri dan Contohnya*. dosensoiologi.com/nilai-agama/.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

4

IDENTITAS BUDAYA

A. Pengertian

Identitas adalah jati diri yang dimiliki seseorang yang ia peroleh sejak lahir hingga melalui proses interaksi yang dilakukannya setiap hari dalam kehidupannya dan kemudian membentuk suatu pola khusus yang mendefinisikan tentang orang tersebut. Sedangkan budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, identitas budaya memiliki pengertian suatu karakter khusus yang melekat dalam suatu kebudayaan sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain (Liliweri, 2013).

Faktor-faktor pembentuk identitas budaya sebagai berikut.

1. Kepercayaan

Kepercayaan menjadi faktor utama dalam identitas budaya. Tanpa kepercayaan yang dianut tidak akan terbentuk identitas budaya pada suatu kebudayaan. Contohnya, memercayai tradisi pecah telur pada saat resepsi pernikahan adat Jawa yang dipercaya sebagai salah satu tradisi penting.

2. Rasa aman

Perasaan aman bagi penganut suatu kebudayaan menjadi faktor terbentuknya identitas budaya karena bila pelaku kegiatan budaya merasa aman, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang dianggapnya negatif. Contohnya, tidak ada kebiasaan menyakiti sesama karena dianggap menyakiti makhluk lain adalah tidak memberikan rasa aman bagi siapapun.

3. Pola perilaku

Pola perilaku seseorang di masyarakat mencerminkan identitas budaya yang dianut. Umumnya terjadi diskriminasi terhadap orang-orang tertentu yang dianggap berperilaku kurang baik menurut orang sekitarnya (Liliweri, 2002).

Sementara itu, menurut Koentjaraningrat (2015), faktor-faktor yang memengaruhi identitas budaya maupun yang berkaitan erat dengan identitas budaya adalah sebagai berikut.

1. Asimilasi budaya

Asimilasi budaya adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memerhatikan kepentingan serta tujuan bersama.

Contoh asimilasi budaya adalah program transmigrasi yang dilaksanakan di Riau pada masa pemerintahan Orde Baru. Program transmigrasi ini tidak hanya berhasil meratakan jumlah penduduk di berbagai pulau di Indonesia, tetapi program transmigrasi ini juga mengakibatkan terjadinya asimilasi, terutama di wilayah Riau. Hal ini terlihat dari banyaknya transmigran yang menghasilkan budaya baru, misalnya Jawa-Melayu, Mandailing-Melayu, dan lain sebagainya (Koentjaraningrat, 2015).

2. Akulturasi budaya

Akulturasi (*acculturation* atau *culture contact*) adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.

B. Stereotip

Stereotip menurut Samovar et.al (2010) merujuk pada suatu keyakinan yang berlaku digeneralisasikan, terlalu dibuat mudah, sederhana, atau dilebih-lebihkan mengenai suatu kategori atau kelompok orang tertentu. Secara singkat bahwa stereotip adalah generalisasi atas sekelompok orang yang dianut oleh budaya tertentu.

1. Pengertian Stereotip

Menurut Samovar et.al (2010), stereotip adalah persepsi atau kepercayaan yang dianut mengenai kelompok atau individu berdasarkan pendapat dan sikap yang lebih dulu terbentuk. Kecenderungan seseorang atau suatu kelompok untuk memiliki stereotip terhadap kelompok lain dapat memengaruhi interaksi antarkeduanya.

Sementara itu, menurut Rumondor et.al berkembangnya stereotip tersebut bisa menjadi potensi yang menghambat dalam komunikasi antarbudaya. Kesalahpahaman antarbudaya seperti ini dapat dikurangi bila setiap kelompok atau daerah setidaknya mengetahui bahasa dan prilaku budaya orang lain, serta mengetahui prinsip-prinsip komunikasi antarbudaya dan mempraktikkannya dengan bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari (Rumondor, 2014).

2. Dimensi Stereotip

Stereotip muncul karena dipelajari dari berbagai cara. *Pertama* dari orang tua, saudara atau siapa saja yang berinteraksi dengan seseorang. *Kedua*, dari pengalaman pribadi. *Ketiga*, dari media massa.

Secara umum stereotip memiliki empat dimensi yakni sebagai berikut.

- a. Arah (*direction*), menunjuk pada arah penilaian, apakah positif atau negatif. Misalnya disenangi atau dibenci.
- b. Intensitas, menunjuk pada seberapa kuatnya keyakinan dari suatu stereotip.
- c. Ketepatan, ada stereotip yang benar-benar tidak menggambarkan kebenaran, atau sebagian tidak benar.
- d. Isi khusus, sifat-sifat khusus mengenai suatu kelompok. Stereotip mengenai suatu kelompok dapat berbeda-beda artinya dan stereotip dapat berubah dari waktu ke waktu (Rumondor et.al, 2014).

3. Stereotip dan Komunikasi Antarbudaya

Stereotip dapat menghambat suatu proses komunikasi. Ada empat alasan mengapa stereotip menghambat komunikasi antarbudaya, yaitu sebagai berikut.

- a. Stereotip merupakan jenis penyaring. Stereotip menyediakan informasi yang konsisten dengan informasi yang dipercayai oleh seseorang. Misalnya perempuan sejak lama distereotipkan sebagai kelompok satu dimensional. Stereotip perempuan sebagai ibu rumah tangga menghalangi perempuan untuk maju dalam dunia kerja.
- b. Stereotip bukan pengelompokan yang menyebabkan masalah antarbudaya, namun, asumsi bahwa semua informasi spesifik mengenai suatu budaya diterapkan pada semua orang dari

kelompok tertentu. Menganggap semua orang dalam suatu kelompok memiliki sifat yang sama.

- c. Stereotip menghalangi keberhasilan sebagai seorang komunikator karena stereotip biasanya berlebih-lebihan, terlalu sederhana, dan terlalu menyamaratakan. Stereotip berubah karena didasarkan pada premis dan asumsi yang sebagian benar dan kadang tidak benar (Samovar et.al, 2010).

C. Prasangka

Prasangka adalah membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Awalnya, istilah ini merujuk pada penilaian berdasar ras seseorang sebelum memiliki informasi yang relevan yang bisa dijadikan dasar penilaian tersebut. Selain itu, prasangka diterapkan juga pada bidang lain selain ras. Pengertiannya sekarang menjadi sikap yang tidak masuk akal yang tidak terpengaruh oleh alasan rasional (Rosnow, 1972).

John E. Farley dalam Farley (1992) mengklasifikasikan prasangka ke dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut.

- 1. Prasangka kognitif, merujuk pada apa yang dianggap benar.
- 2. Prasangka afektif, merujuk pada apa yang disukai dan tidak disukai.
- 3. Prasangka konatif, merujuk pada bagaimana kecenderungan seseorang dalam bertindak.

Di tempat lain, Sarwono dalam Gerungan mengatakan bahwa prasangka merupakan salah satu bentuk sikap. Definisi sikap menurut Ajze dalam Gerungan adalah reaksi penilaian *favorable* atau *unfavorable* dari individu terhadap benda, individu lain, institusi, atau kejadian. Berdasarkan pengertian sikap maka prasangka dapat dikatakan merupakan penilaian individu terhadap suatu objek yang dapat berupa kelompok tertentu atau berupa individu lain yang berasal dari kelompok tertentu. Hanya saja dalam hal ini, sikap yang ditunjukkan bersifat negatif atau *unfavorable* (Gerungan, 1996).

Menurut Baron dan Byrne (1994), prasangka (*prejudice*) adalah sikap yang biasanya negatif terhadap anggota-anggota suatu kelompok yang hanya didasari keanggotaan mereka pada kelompok tersebut.

Berikut adalah faktor-faktor yang menumbuhkan prasangka.

1. *Kepentingan*. Jika terjadi benturan kepentingan antara satu orang dengan orang lain terlebih orang yang berbenturan kepentingan itu berasal dari kelompok atau golongan yang berbeda.
2. *Faktor kepribadian dari orang yang berprasangka*. Orang yang berprasangka biasanya memiliki kepribadian yang tidak toleran, kurang mengenal diri sendiri, kurang berdaya cipta, tidak merasa aman, memupuk khayalan, dan lain-lain.
3. *Faktor frustasi dan agresi*. Prasangka sosial dapat menjelma ke dalam tindakan-tindakan diskriminatif, agresif terhadap orang yang diprasangkai. Teori frustasi adalah saat orang akan mengalami frustasi apabila maksud-maksud dan keinginan yang diperjuangkan dengan intensif mengalami kegagalan atau hambatan. Akibatnya, timbul perasaan jengkel atau perasaan-perasaan agresif yang akan ditumpahkan kepada orang lain. Hal ini yang dinamakan dengan teori Seapegatisme atau teori kambing hitam.

Daftar Pustaka

- Baron, R.A., & Byrne, D.E. 1994. *Social Psychology: Understanding Human Interaction*. Boston: Alyn and Bacon Inc.
- Farley, John E. 1992. *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gerungan, W.A. 1996. *Psikologi Sosial*. Bandung, PT. ERESCO.
- Koentjaraningrat. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Liliweri, Alo. 2002. *Makna Budaya dalam Komunikasi antar Budaya*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Liliweri, Alo. 2013. *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosnow, Ralph L. 1972. *Poultry and Prejudice*. USA: Psychology Today.
- Rumondor, Feybee H., Paputungan, Ridwan., & Tangkudung, Pingkan. 2014. “Stereotip suku Minahasa terhadap Etnis Papua.” Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/download/5038/4555> pada tanggal.
- Samovar, Larry A., Porter, Richard E., & McDaniel, Edwin R. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya*, Jakarta: Salemba Humanika.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

5

KONFLIK, *FACE NEGOTIATION* THEORY DAN TINDAKAN PREVENTIF KOMUNIKASI

A. Pengertian Konflik

Soerjono Soekanto dalam Ahmadi, menyebutkan bahwa konflik merupakan suatu proses sosial individual atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Lewis A. Coser menyebutkan bahwa konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langkah dengan maksud menetralkan, mencederai atau melenyapkan lawan (Mustamin, 2016).

Sementara itu, Gillin dan Gillin melihat konflik sebagai bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Artinya, konflik adalah bagian dari proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan baik fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Kemudian, Pruitt & Rubin menegaskan bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika memahami konflik pada dimensi ini, maka unsur-unsur yang ada

di dalam konflik adalah persepsi, aspirasi dan aktor yang terlibat di dalamnya (Susan, 2009).

Dari pengertian konflik beberapa tokoh di atas tersebut, dapat dirangkum bahwa konflik berarti bagian dari interaksi sosial antara dua orang atau lebih dan salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan, mencederai, maupun melenyapkan pihak lain, biasanya terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan, perilaku, dan kebudayaan. Karena setiap manusia memiliki pandangan dan kebudayaan yang berbeda-beda, perbedaan ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial karena dalam suatu hubungan sosial tidak semuanya sejalan.

B. Penyelesaian Konflik

Konflik dapat menyebabkan pecahnya integrasi sosial. Oleh karena itu, sebaik mungkin konflik harus dihindari dan segera diatasi.

Adapun cara-cara penyelesaian konflik adalah sebagai berikut.

1. Arbitrasi

Arbitrasi adalah penyelesaian konflik yang dibantu oleh pihak ketiga. Pihak ketiga berperan dalam memberikan keputusan yang nantinya harus diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.

2. Mediasi

Penyelesaian konflik menggunakan cara mediasi hampir sama dengan arbitrasi yang dibantu oleh pihak ketiga, namun pihak ketiga tidak memberikan keputusan yang mengikat.

3. Konsiliasi

Menyelesaikan konflik dengan cara konsiliasi ini mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berselisih.

4. *Stalemate*

Arti *stalemate* ini adalah suatu keadaan ketika kedua belah pihak yang berselisih memiliki kekuatan yang seimbang lalu memutuskan untuk berhenti saling menyerang. Keadaan ini dapat terjadi karena kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk maju atau mundur.

5. *Adjudication*

Adjudication adalah penyelesaian konflik dengan cara membawa konflik tersebut ke pengadilan.

6. *Elimination*

Maksud *elimination* adalah pengunduran diri salah satu pihak yang berselisih atau konflik dianggap selesai jika salah satu pihak yang berselisih memilih untuk menyerah.

7. *Subjugation* atau *Domination*

Subjugation atau *domination* adalah penyelesaian konflik dengan cara pihak yang memiliki kekuatan terbesar atau pengaruh yang besar memaksa pihak lainnya untuk menaatinya.

8. *Majority Rule*

Penyelesaian masalah dengan cara melakukan *voting* untuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi kedua belah pihak yang berselisih (Johnson, 1989).

C. ***Face Negotiation Theory***

Teori *Face Negotiation* ini pertama kali dikembangkan oleh Stella Ting-Toomey pada tahun 1985. Teori ini adalah teori untuk memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda mengelola hubungan dan perbedaan pendapat. Teori ini mengidentifikasi bagaimana orang-orang yang memiliki budaya berbeda dapat bernegosiasi atau mengatasi konflik dalam komunikasi tanpa harus ada pihak yang merasa menang atau kalah. Teori negosiasi

rupa memberikan sebuah dasar untuk memperkirakan bagaimana manusia akan menyelesaikan karya rupa dalam kebudayaan yang berbeda. Teori ini berpendapat bahwa rupa atau “citra diri” sebagai fenomena universal yang meliputi lintas budaya (Fakhri, n.d.).

Dalam teori ini, “rupa” adalah sebuah metafora untuk citra diri yang berasal dari dua konseptualisasi Cina yaitu *Lien* dan *Mien tzu*. *Lien* adalah rupa moral yang internal yang melibatkan malu, integritas, kehinaan, dan masalah kehormatan. *Mien tzu* adalah rupa sosial eksternal yang melibatkan pengakuan sosial, posisi, otoritas, pengaruh, dan kekuasaan.

Melakukan komunikasi secara efektif dengan orang yang berbeda kebudayaan, menurut Deddy Mulyana, dalam lingkungan sekitar merupakan sebuah tantangan. Terutama karena budaya merupakan faktor penting dalam melakukan komunikasi. Kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, khususnya yang berbeda budaya, bukan saja merupakan kesulitan memahami bahasa yang tidak dikuasai, melainkan juga sistem nilai dan bahasa nonverbal orang tersebut (Mulyana, 2005). Hambatan dalam komunikasi antarbudaya di lingkungan dapat menimbulkan terjadinya kegelisahan peran, norma, dan juga etnosentrisme (Mulyana, 2005).

D. Tindakan Preventif Konflik

Tindakan preventif adalah sebuah cara atau upaya yang dilakukan individu dalam menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *praventire* yang artinya datang mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian lain preventif mempunyai arti yaitu usaha yang secara sengaja dilakukan untuk mencegah timbulnya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang.

Oleh karena itu, tindakan preventif konflik adalah tindakan yang dilakukan sebelum konflik terjadi. Tindakan preventif dilakukan karena konflik merupakan hal yang mengakibatkan kerugian bagi individu dan lingkungannya. Upaya preventif biasanya dilakukan

sebelum suatu masalah atau konflik terjadi yang bertujuan untuk mencegah masalah atau konflik tersebut datang (L'Abate, 1990).

Menurut L'Abate, sebagian besar program preventif yang efektif memiliki karakteristik antara lain:

1. fokus terhadap pemahaman mengenai risiko dan masalah dari perilaku yang ingin dicegah dalam kelompok sasaran;
2. desain untuk mengubah "*life trajectory*" dari kelompok sasaran, dengan menyediakan pilihan dan kesempatan dalam jangka panjang yang sebelumnya tidak tersedia;
3. kesempatan untuk mempelajari keterampilan hidup baru yang dapat membantu partisipan untuk menghadapi *stress* secara lebih efektif dengan dukungan sosial yang ada;
4. fokus dalam menguatkan dukungan dasar dari keluarga, komunitas atau lingkungan sekolah (L'Abate, 1990).

Dari uraian di atas, tindakan preventif konflik dapat diterapkan oleh individu dengan cara-cara yang memiliki karakteristik pada uraian di atas. Bila cara-cara yang dilakukan telah mengandung karakteristik di atas maka dapat meminimalisir konflik yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Fakhri, Azwanil. (n.d.). “Teori Negosiasi Rupa”. Diakses dari https://www.academia.edu/20290697/Teori_Negosiasi_Rupa_Face_Negotiation_Theory_pada_tanggal pada tanggal
- Johnson, Doyle Paul. 1989. *Sosiologi Klasik dan Modern*. Diterjemahkan oleh Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.
- L'Abate, Luciano. 1990. *Building Family Competence, Primary and Secondary Preventions Strategies*. New York: Sage Pub.
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustamin. 2016. “Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014”. Diakses dari <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/109> pada tanggal
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahyudi, Andri. 2015. “Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan”. Diakses dari <http://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/viewFile/45/41> pada tanggal
- Warisan, BI. 2013. “Strategi Penyelesaian Konflik. Skripsi Unila”. Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/925/9/BAB%20II.pdf> pada tanggal

6

KASUS KONFLIK DI INDONESIA

A. Konflik Antaragama di Maluku

Konflik yang terjadi antara pengikut agama Islam dan Kristen di Maluku merupakan salah satu sejarah gelap yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Konflik yang terjadi mulai tahun 1999 hingga tahun 2000, mengejutkan banyak pihak, baik lokal, nasional, maupun internasional. Konflik ini menjadi suatu peringatan bagi bangsa Indonesia untuk waspada mengenai isu-isu yang dapat memicu polemik antarbudaya.

Pertikaian diawali pada tanggal 19 Januari 1999, saat umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1419 H. Konflik diawali dari pertikaian antara seorang supir angkot beragama Kristen dengan seorang pemuda keturunan Bugis beragama Islam. Perselisihan antara keduanya memicu konflik yang lebih besar, dengan terjadinya penyerangan ke wilayah Mardika yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Penyerangan tersebut dibalas oleh kelompok Kristen dari daerah Kuda Mati dan Batu Gantung dengan membawa senjata tajam dan menyerang desa-desa Islam (Trijono, 2001).

Menurut *The Human Right Watch Report, March 1999*, terdapat dua versi penyebab konflik tersebut. *Pertama*, adalah versi Tim Pengacara Gereja yang dipercaya oleh kebanyakan komunitas Kristen dan *kedua* adalah versi Tim Pencari Fakta Muslim Ambon. Menurut penuturan versi pertama, seorang pemuda keturunan Bugis bernama Nursalim, meminta uang kepada Yopi, seorang sopir angkutan kota yang beragama Kristen. Hal ini kemudian memicu pertikaian. Menurut versi kedua, Yopi menyewakan mobil tanpa sepengetahuan Nursalim, yang menurut versi ini adalah kernet angkot. Yopi menolak dimintai bagian hasil penyewaan mobil tersebut (Trijono, 2001).

Menurut Jamin Safi, kerusuhan di Maluku merupakan konspirasi kelompok Republik Maluku Selatan untuk mewujudkan sebuah negara Kristen yang berdaulat serta merupakan usaha separatis untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini disebut-sebut sebagai pengejawantahan Gerakan *Oikumene* yang digagas oleh kolonial Belanda. Terjadinya Idul Fitri berdarah tanggal 19 Januari 1999 digunakan sebagai sebuah strategi dan peluang bagi pemerintah Republik Maluku Selatan untuk menyusun kekuatan.

Konflik kemudian berlanjut hingga ke tahun 2002, dengan menyebar ke beberapa daerah lain seperti Tidore, Ternate, Jailolo dan Bacan. Rumah dan tempat ibadah Masjid dan Gereja rusak atau terbakar dan kebanyakan korban jiwa adalah perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa (Safi, 2017).

Pemerintah berusaha mengatasi permasalahan ini dengan cara membentuk tim yang disusun dari aparat keamanan dengan jumlah yang banyak. Gubernur Maluku juga membentuk sebuah tim yang terdiri dari beberapa pemuka agama Islam, Kristen dan Katolik, untuk membangun kerukunan antaragama dan mencegah terjadinya eskalasi konflik lebih luas. Namun, belakangan program ini tidak terlaksana dengan baik karena sikap etnosentrisme masih melekat pada para pemimpin agama tersebut. Ketidakseriusan para pemuka agama dalam menyelesaikan konflik dianggap menjadi kendala (Krisandi et.al, 2013).

Cara lain yang ditempuh adalah melalui pendekatan adat dengan mengedepankan kearifan lokal. Pendekatan ini dilakukan dengan upaya menjalin kembali jalinan persaudaraan di antara masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan *Panas Pela*. Tujuannya adalah kembali menghidupkan budaya *Pela Gandong* bagi desa yang memiliki ikatan *Pela*. Pada tahun 2007, dibentuk suatu forum raja-raja adat yang kemudian mencetuskan suatu Majelis Latupati Maluku, sebagai pengakuan kembali peran raja di masyarakat. Peran raja adalah sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi (Krisandi et.al, 2013).

Menurut Ernita Krisandi, masyarakat lokal juga memulai gerakan-gerakan sebagai langkah antisipasi konflik. Contohnya Gerakan Baku Bae yang merupakan gerakan masyarakat sipil yang secara aktif dalam upaya penyelesaian konflik Maluku. Dibentuk pula beberapa gerakan-gerakan lain seperti Jaringan Pendidikan Anak (JPA) dan Gerakan Perempuan Peduli (GPP). Gerakan-gerakan ini diprakarsai oleh kelompok perempuan dari masing-masing kelompok agama. Kelompok ini melakukan rekrutmen secara diam-diam mengingat keadaan sangat tidak kondusif. Gerakan ini mencetuskan berbagai kegiatan untuk mencegah dan meredakan konflik seperti sosialisasi penghentian konflik, konseling, dan pelatihan bagi ibu-ibu dan kaum muda (Krisandi et.al, 2013).

B. Konflik Sampit di Kalimantan

Konflik Sampit berawal pada Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun itu. Konflik ini pecah di Kota Sampit, Kalimantan Tengah dan meluas ke seluruh provinsi, termasuk Ibukota Palangka Raya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura berasal dari Pulau Madura. Kerusuhan sosial Sampit menurut Abdul Rachman Patji, memang masih menyisakan banyak pertanyaan dan permasalahan. Ada asumsi yang menyatakan bahwa latar belakang munculnya konflik Sampit karena warga Dayak cemburu kepada kelompok etnis Madura yang tergolong sukses

dalam perekonomian. Menanggapi asumsi ini, seorang tokoh masyarakat Dayak menyatakan bahwa harus diakui banyak orang Madura berhasil di bidang ekonomi, tetapi bukan hal itu yang menyulut terjadinya konflik Sampit (Patji, 2003).

Minggu dini hari, 18 Februari 2001, tepat pukul 01.00 WIB, sekelompok warga Dayak menyerang rumah seorang warga Madura bernama Matayo di Jalan Padat Karya. Empat orang meninggal dunia dan satu orang luka berat akibat serangan itu, semuanya adalah warga Madura. Serangan yang diduga aksi balas dendam itu pun mendapat perlakuan. Pagi harinya, sekitar pukul 08.00 WIB, sejumlah warga Madura mendatangi rumah seorang Dayak bernama Timil yang diduga menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Saat itu Timil berhasil diamankan polisi tetapi warga Madura yang tak puas langsung membakar rumahnya. Warga Madura yang marah juga menyerang rumah kerabat Timil dan menewaskan tiga penghuninya (Rinaldo, 2019).

Pada pukul 12.00 WIB, pasukan Brimob Polda Kalimantan Selatan sebanyak 103 personel dengan kendali BKO Polda Kalteng tiba di Sampit. Puluhan tersangka berikut barang bukti senjata tajam kemudian dibawa ke Mapolda Kalteng di Palangka Raya. Namun, situasi tidak mereda. Sampai keesokan harinya, Senin 19 Februari, ditemukan sejumlah jasad di berbagai sudut Kota Sampit. Aksi penyerangan rumah serta pembakaran kendaraan semakin meluas. Kondisi ini membuat Wakil Gubernur Kalteng mengirimkan bantuan 276 personel TNI dari Yonif 631/ATG ke Sampit pada malam itu juga. Pada tanggal 18 dan 19 Februari 2001, Kota Sampit sepenuhnya dikuasai warga dari Madura. Selama dua hari sejak penyerangan rumah Matayo, warga Madura berhasil bertahan, bahkan berani melakukan *sweeping* terhadap permukiman-permukiman warga Dayak.

Namun, situasi berbalik pada 20 Februari 2001, ketika sejumlah besar warga Dayak dari luar kota berdatangan ke Sampit. Warga Dayak pedalaman dari berbagai lokasi daerah aliran sungai (DAS) Mentaya, seperti Seruyan, Ratua Pulut, Perenggean, Katingan

Hilir, bahkan Barito berdatangan ke Kota Sampit melalui hilir Sungai Mentaya dekat pelabuhan. Ratusan warga Dayak itu lalu menyusup ke daerah Baamang dan sekitarnya yang merupakan pusat permukiman warga Madura. Mereka mampu memukul balik warga Madura yang terkonsentrasi di berbagai sudut jalan Sampit (Rinaldo, 2019).

Hari-hari berikutnya kelompok etnis Dayak terus meluaskan serangan. Bahkan menurut Liputan 6, sebelum menyerang, seorang tokoh atau panglima Dayak dikabarkan lebih dulu membekali ilmu kebal kepada pasukannya. Karena itu, saat melakukan serangan, biasanya mereka berada dalam alam bawah sadar. Bahkan, mereka juga dibekali indera penciuman tajam untuk membedakan orang Madura dan non-Madura.

Berada di atas angin, warga Dayak melebarkan serangan ke berbagai kawasan di Kotawaringin Timur. Warga Dayak pun praktis menguasai hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah, kecuali Pangkalan Bun yang tetap aman karena hampir tak ada warga Madura yang tinggal di tempat ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, korban jatuh mencapai sekitar 400 jiwa. Sedangkan menurut data kepolisian, ada 319 lebih rumah dibakar dan sekitar 197 lainnya dirusak. Sementara menurut data dari Polres Kotawaringin Timur, jumlah korban meninggal dari kedua belah pihak kerusuhan Sampit ada 315 orang. Jumlah rumah yang dibakar 583 dan dirusak 200. Sementara delapan mobil dan 48 sepeda motor dirusak (Rinaldo, 2019).

Setelah konflik mereda, pemerintah melakukan langkah awal untuk menyelesaikan konflik. Beberapa konten pokok yang berkontribusi pada penyelesaian konflik dan preservasi suasana damai pascakonflik menurut Suharno adalah sebagai berikut.

1. Pemulangan kelompok etnis Madura dari pengungsian, hidup berdampingan dan saling menjunjung prinsip kesetaraan.
2. Pembinaan mental dan pendidikan untuk menghilangkan trauma pascakonflik serta keterbelakangan.

3. Penataan pemukiman dan penghindaran pemukiman bergerombol berdasarkan etnis tertentu.
4. Tidak saling menuntut, termasuk warga etnis Madura tidak menuntut ganti rugi pengembalian atas asetnya yang dikuasai oleh etnis Dayak (Suharno, 2013).

Dapat disimpulkan, Perda Kotawaringin Timur tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnis dengan berbagai ketentuan dengan implementasinya telah berhasil menyelesaikan konflik etnik di Sampit, Kotawaringin Timur dengan mengakomodasi kepentingan warga Dayak sebagai pihak yang ‘menang’ dalam ‘perang’ tersebut tanpa menihilkan atau menafikan hak warga Madura yang terusir dari Sampit dan ingin kembali ke wilayah tersebut.

Daftar Pustaka

- Krisandi, Ernita., Setyono, Budi., & Utomo, Tri Cahyo. 2017. “Resolusi Konflik Komunal di Maluku Pascareformasi”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang*, 2(2): 1-10.
- Patji, Abdul Rachman. 2003. “Tragedi Sampit 2001 dan Imbasnya Ke Palangka Raya (dari Konflik ke (Re)Konstruksi)”. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(2): 1-21.
- Rinaldo. 2019. “Kerusuhan Sampit, Kegagalan Merawat Perbedaan 18 Tahun Silam”. Diakses dari <https://m.liputan6.com/news/read/3897282/kerusuhan-sampit-kegagalan-merawat-perbedaan-18-tahun-silam> pada tanggal
- Suharno, Suharno., Samsuri, Samsuri., & Nurhayati, Iffah. 2013. “Pengembangan Model Resolusi Konflik Untuk Masyarakat Multikultural (Studi Implementasi Kebijakan Resolusi Konflik di Sampit, Poso, dan Ambon)”. Diakses dari <https://eprints.uny.ac.id/22688/> pada tanggal

- Safi, Jamin. 2017. "Konflik Komunal: Maluku 1999-2000". *Istoria: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 13(1): 33-44.
- Trijono, Lambang. 2001. *Keluar dari Kemelut Maluku, Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja untuk Perdamaian Maluku*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

7

KEARIFAN LOKAL DI DAERAH DAN PENYELESAIAN KONFLIK

A. Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan Lokal atau sering disebut *local wisdom* adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis (Keraf, 2002).

Pada dasarnya kearifan lokal, menurut Akhmar dan Syarifudin, merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat berupa tata nilai atau perilaku hidup bermasyarakat lokal dalam berinteraksi dengan tempat atau daerah hidupnya. Kearifan lokal dilihat sebagai salah satu bentuk perilaku manusia dan bukan suatu hal yang statis, melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat (Akhmar dan Syarifudin, 2007).

Menurut I Ketut Gobyah (2003), kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi pada suatu daerah. Perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografi dalam arti luas. Kearifan lokal, masih menurut

Gobyah, merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal, nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

Sementara itu, menurut Sartini (2004) definisi kearifan lokal secara umum dapat diartikan sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Untuk mengetahui suatu kearifan lokal di suatu wilayah, seseorang harus bisa memahami nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut sebab kearifan lokal merupakan nilai yang dianggap baik dan benar yang berlangsung secara turun-temurun dan dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai akibat dari adanya interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Kearifan lokal itu terdapat dalam masyarakat, komunitas, dan individu. Dengan demikian, kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah diperaktikkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia, adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan (Kristiyanto, 2017).

B. Ciri-ciri dan Fungsi Kearifan Lokal

Moendarjito dalam Ayat Rohaedi (1986) mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial dijadikan sebagai lokal genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah:

1. mampu bertahan terhadap budaya luar;
2. memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar;
3. mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli;

4. mempunyai kemampuan mengendalikan;
5. mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Sementara itu, menurut Nyoman Sirtha, bentuk kearifan lokal di Indonesia yang ada dalam masyarakat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Terdapat pendapat lain yang mengklasifikasikan kearifan lokal ke dalam dua aspek (Rohaedi, 1986), yaitu sebagai berikut.

1. *Wujud Nyata (Tangible)*

- a. Tekstual
- b. Bangunan atau Arsitektual
- c. Benda Cagar Budaya atau Tradisional (Karya Seni).

2. *Tidak Berwujud (Intangible)*

Contohnya, yaitu petuah yang disampaikan secara verbal dan seni suara berupa nyanyian, pantun, cerita, serat nilai-nilai ajaran tradisional. Serat ini disampaikan secara verbal dari generasi ke generasi.

Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sebab kearifan lokal kemudian menjadi bagian dari cara hidup suatu kelompok untuk memecahkan segala permasalahan hidup yang mereka hadapi. Berkat kearifan lokal mereka dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Adapun fungsi kearifan lokal terhadap masuknya budaya luar adalah (Rohaedi, 1986):

1. sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar;
2. mengakomodasi unsur-unsur budaya luar;
3. mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli;
4. memberi arah pada perkembangan budaya.

C. Contoh Kearifan Lokal di Daerah

1. Upacara Tingkeban atau Mitoni (Nujuh Bulanan)

Upacara Tingkeban adalah salah satu tradisi masyarakat di Jawa. Menurut Sutiyono, tradisi Mitoni berasal dari kata pitu yang berarti tujuh dilaksanakan setelah kehamilan berusia tujuh bulan dan kehamilan yang pertama kali sehingga untuk kehamilan yang selanjutnya tidak perlu diadakan acara *slametan* yang disebut dengan Mitoni atau Tingkeban (Sutiyono, 2013). Upacara ini bermakna bahwa pendidikan bukan saja setelah dewasa akan tetapi semenjak benih tertanam di dalam rahim ibu. Dalam upacara ini sang ibu yang sedang hamil dimandikan dengan air kembang setaman dan disertai doa yang bertujuan untuk memohon kepada Tuhan YME agar selalu diberikan rahmat dan berkah sehingga bayi yang akan dilahirkan selamat dan sehat.

2. Menghormati Sesama Penghuni

Dalam *Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy*, menurut Pratama (2011), berbagai contoh kearifan dalam pelestarian lingkungan hidup masyarakat lokal dapat pula ditemukan misalnya pada masyarakat Kasepuhun (Jawa Barat), masyarakat Siberut (Sumatera Barat), masyarakat Kajang (Sulawesi Selatan), dan masyarakat Dani (Papua). Umumnya, masyarakat lokal beranggapan bahwa ada yang memiliki dan menghuni lingkungan di sekitar mereka selain manusia. Oleh karena itu, manusia yang berdiam di sekitarnya harus menghormati dan menjaga tempat-tempat mereka itu, seperti, hutan, gunung, lembah, dan sumber air. Bahkan tidak sedikit tempat-tempat tersebut dijadikan tempat yang sakral atau dikeramatkan.

D. Penyelesaian Konflik

Badruzzaman Ismail, dikutip oleh Abidin Nurdin (2013), menyatakan bahwa kearifan lokal sudah lama teraplikasi dalam suatu masyarakat yang dipakai sebagai norma dan nilai dalam perilaku dan berinteraksi dengan Tuhan, manusia dan dengan alam. Termasuk di dalamnya menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat juga memakai mekanisme kearifan lokal. Sebagai contoh proses penyelesaian konflik yang berkembang dalam masyarakat diselesaikan dalam kerangka adat yang sarat dengan nilai-nilai agama. Pelaksanaan *Di'iet, Sayam, Suloh, Peusijuk* dan *Peumet Jaroe* merupakan proses penyelesaian konflik berbasis adat yang sudah lama mengakar dalam masyarakat Aceh. Tradisi ini merupakan proses penyelesaian konflik yang sangat demokratis tanpa terjadinya pertumpahan darah dan dendam di antara kedua belah pihak yang berkonflik, baik vertikal maupun horizontal.

Di'iet atau Diyat menurut Syahrizal Abbas (2013) adalah pola penyelesaian konflik dapat diketahui tingkat kemaafan yang diberikan oleh korban atau ahli waris korban. Jika kemaafan telah diberikan, para pemangku adat atau Tetua Gampong mengompromikan atau bermusyawarah dengan pelaku atau ahli warisnya tentang jumlah *Di'iet* yang harus dibayarkan oleh pelaku pidana. Biasanya pembayaran *Di'iet* dilakukan dengan suatu upacara adat yang di dalamnya terdiri atas kegiatan *Peusijuek* dan *peumat Jaroe*. Keterlibatan institusi adat dan budaya dalam penyelesaian kasus pidana, bertujuan untuk menghilangkan dendam antara para pihak yang bertikai. Penyelesaian konflik dengan pola *Di'iet* ditujukan untuk menghilangkan dendam dan rasa permusuhan berkepanjangan antara para pihak bertikai yang telah mengakibatkan kekerasan dan bahkan pembunuhan. Kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh dapat bermula dari perebutan lahan pertanian, penguasaan sumber-sumber ekonomi Gampong atau hal-hal lain yang mungkin terjadi dalam interaksi sosial masyarakat. Pola *Di'iet* ini hanya ditujukan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan. Dalam penyelesaian

konflik yang berakhir dengan pembunuhan, maka yang bertindak sebagai fasilitator, negosiator, dan mediator adalah Keuchik, Teungku Meunasah dan Tetua Gampong termasuk pemangku adat. Mereka inilah yang melakukan pembicaraan-pembicaraan awal dengan ahli waris korban dan pelaku pidana atau ahli warisnya. Pelibatan keluarga besar dari para pihak menjadi sangat penting dalam pembicaraan tersebut, karena untuk menghindari dendam di belakang hari.

Contoh yang paling nyata penggunaan *Di'et* sebagai kearifan lokal dalam menyambung kembali hubungan sosial yang renggang adalah pembayaran *Diyat* diberikan kepada masyarakat Aceh yang telah meninggal dan luka dan berbagai bentuk korban pascakonflik. Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Provinsi Aceh sejak 2002 yang kemudian diambil alih oleh Badan Rekonstruksi Aceh sejak 2005 mengelola dana *Diyat*. Jumlah dana *Diyat* korban konflik yang masing-masing penerima memeroleh Rp3 juta/tahun untuk masa lima tahun. Sampai tahun 2011, dana *diyat* termasuk bantuan ekonomi untuk korban konflik mencapai 2.2 Triliun (Syahrizal Abbas, 2013).

Daftar Pustaka

- Abas, Syahrizal. 2013. "Diyat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh dalam Media Syariah". *Analisis*. Volume XIII, Nomor 1, Juni.
- Abidin, Nurdin. 2013. "Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat". Diakses dari <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/645/543> pada tanggal
- Akhmar, Andi M. dan Syarifuddin. 2007. *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*,

- PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI dan Masagena Press. Makassar.
- Ayat, Rohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Gobyah, I. Ketut. 2003. "Berpijak Pada Kearifan lokal". Diakses dari www.balipos.co.id. Pada tanggal 21 November 2019.
- Keraf, A. S. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Kristiyanto, Eko Noer. 2017. "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang Di Daerah". Diakses dari <https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/artikel%20eko.pdf> pada tanggal
- Pratama, Cecep. et.al. 2011. "Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy". *Makara, Sosial Humaniora*. Vol.15. No.1.
- Sartini. 2004. "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati. *Jurnal Filsafat*. Jilid 37. Nomor 2. Agustus.
- Sutiyono. 2013. *Poros Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

8

PERAN PEMERINTAH DALAM MERAWAT KEBERAGAMAN DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Indonesia, menurut Dede Rosyada, adalah sebuah negara besar dengan jumlah penduduk mencapai 269,728,379 jiwa yang menghuni lima pulau besar Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Terdapat 17,504 pulau yang termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan enam agama besar yang diakui pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu serta ratusan agama tradisional. Indonesia juga memiliki 1340 dengan 300 etnik dan memiliki lebih dari 652 bahasa daerah (Rosyada, 2015). Dengan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia, maka pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam merawat keberagaman di Indonesia (Permana, 2018).

Winataputra (2012) mengemukakan bahwa ada empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Keempat pilar tersebut perlu ditransformasi secara fungsional dalam berbagai ranah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mentransformasikan empat pilar kebangsaan tersebut, menurut Lestari, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat dan didukung oleh

kebijakan pemerintah yang mendukung terciptanya Bhineka Tunggal Ika. Kebijakan yang ditempuh adalah membangun kesejahteraan berbangsa dan bernegara di atas ke-Bhinneka Tunggal Ika-an agar terwujud kehidupan rakyat yang sejahtera, rukun, aman, damai, saling menghormati, demokrasi dalam menghadapi globalisasi yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya stabilitas nasional yang mantap dan tangguh (Lestari, 2015).

Undang Undang Dasar Republik Indonesia pada hakikatnya telah mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selain itu, Undang-Undang Dasar sebagai rujukan tertinggi hukum di Indonesia telah mengamanatkan juga bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini dikatakan oleh Pasal 32 Ayat 1 UUD 45. Sementara, yang mengatur tentang keberagaman tertulis di Undang Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 3 huruf b yang mengatakan bahwa asas keberagaman adalah mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Untuk melakukan pengayaan keberagaman menurut Undang Undang Nomor 5 tahun 2017 Pasal 30 huruf c, dilakukan melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

B. Peran Pemerintah

Peran aktif dari pemerintah diperlukan untuk bisa mengelola keberagaman sosial budaya agar tetap terpelihara. Peran-peran ini tidak dapat diatur sendiri oleh pemerintah pusat sehingga memerlukan bantuan pemerintah daerah dalam melestarikan keberagaman sehingga pemerintah pusat hanya memantau dan pemerintah daerah yang terjun langsung ke masyarakat. Peran pemerintah daerah masih menurut sumber yang sama antara lain adalah sebagai berikut (Peran Pemerintah, n.d.):

1. Sebagai penggerak
2. Mengambil inisiatif
3. Sebagai jembatan ke dunia internasional
4. Sumber modal.
5. Menyusun perundang-undangan.
6. Memberikan dukungan penuh
7. Melakukan pendataan
8. Membentuk kelembagaan
9. Mengadakan pentas seni secara rutin
10. Memaksimalkan penggunaan fasilitas umum.

C. Kelembagaan

Untuk menjangkau masyarakat dalam mewujudkan serta memelihara keberagaman, maka ada beberapa institusi yang bertanggung jawab yaitu, antara lain:

Kemendikbud

Berdasarkan Peraturan Presiden Indonesia (Perpres) Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan (Tugas dan Fungsi, n.d.).

Kementerian ini bertanggung jawab untuk melindungi kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pasal 1 (1) yang mengatakan bahwa pelestarian tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun. Arti kata perlindungan di atas menurut Pasal 1 (2) berarti upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide atau gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.

Kementerian lain yang bertugas untuk merawat keberagaman dan menjaga keberlangsungan budaya dalam masyarakat adalah Kementerian Agama. Tugas Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Presiden Indonesia (Perpres) Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama untuk dan membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (Peraturan, n.d.)

Dalam menyiarkan agama, maka kementerian ini bertugas untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antarumat beragama, pengembangan dan penyiaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, *teposeliro*, saling menghargai, saling menghormati antarumat beragama sesuai jiwa Pancasila (Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 70 tahun 1978 tentang Penyiaran Agama).

Daftar Pustaka

- Kemendikbud. (n.d.). *Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.* <https://www.kemdikbud.go.id/main/informasi-publik/tugas-dan-fungsi>
- Lestari, Gina (2015). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan SARA. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol 28, no 1. <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5437>
- Permana, Irfan Setia (2018). Pemerintah dan Hak Beragama di Indonesia (Peran Pemerintah Dalam Memelihara Hak Beragama di Indonesia). *Jurnal TEDC*, Vol. 12 No. 2.
- Rosyada, Dede. (2015). *Harmoni dalam Keberagaman: Sebuah Kebijakan Politik dan Usaha Bersama Umat Beragama di Indonesia*. [Internet]. Tersedia link : <https://www.uinjkt.ac.id/id/harmoni-dalam-keberagaman-sebuah-kebijakan-politik-dan-usaha-bersama-umat-beragama-di-indonesia/>
- Sekretaris Kabinet. (n.d.). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN AGAMA*. <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174560/Perpres0832015.htm>
- Winataputra, Udin Saripudin. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- 10 Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Keragaman Sosial Budaya. (n.d.). <https://materiips.com/peran-pemerintah-daerah-dalam-mengelola-keragaman-sosial-budaya>

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

TENTANG PENULIS

Dra. Suzy S. Azeharie, M.A., M.Phil, lahir di Jakarta pada 8 November 1959, adalah pengajar di FIKom Universitas Tarumanagara dan mengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi, Teori Komunikasi, Komunikasi Lintas Budaya, dan Presentasi dan Negosiasi. Menyelesaikan studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran pada tahun 1983 dan S2 Gender and Development dari Institute of Social Studies The Hague Holland, serta S2 Humanities dari Murdoch University, Perth Australia. Beliau juga sering menjadi pemakalah seminar ilmiah, antara lain pada The Seventh International Conference on Entrepreneurship and Business Management (November 2018), dengan judul makalah Tourism in Cisarua Changes the Culture of Local People : Study of Culture Acculturation between Local Community and Arab Tourist in Cisarua; Proceeding: The 1st Aceh Global Conference (Oktober 2018) dengan judul makalah Cultural Acculturation of the Villagers in Desa Pegayaman Buleleng Bali, dan lain-lain. Publikasi yang pernah ia terbitkan antara lain “Pola Komunikasi Antarpribadi Antara Guru dan Siswa di Panti Sosial Taman Penitipan Anak “Melati”, Bengkulu” di *Jurnal Penelitian Komunikasi Informatika dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Informatika RI* Vol. 18 No. 3

(Maret 2015); “Fungsi Komunikasi Media Sosial Twitter Pelaksana Tugas Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama” di Proceeding Konferensi Nasional Komunikasi Politik; Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya (Desember 2014), dan lain-lain.

Wulan Purnama Sari, S.I.Kom., M.Si. lahir di Jakarta pada 6 April 1990, adalah Asisten Ahli di FIKom Universitas Tarumanagara. Menyelesaikan studi S1-nya di Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara dan S2 Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia. Seminar yang pernah beliau ikuti sebagai pemakalah antara lain pada Kongres V ASPIKOM (Juli 2019), dengan judul makalah Literasi Media Sosial Sebagai Tindakan Preventif Pada Radikalisme Dan Hoax; Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018) dengan judul makalah Social Interaction between Hinduism and Muslim Group; SEMNASFI City Branding & Tourism Policy Based On Cultural Wisdom In Indonesia (Oktober 2017), dengan judul makalah Kapitalisme dalam Pariwisata Analisis Marxist Enjoy Jakarta, dan lain-lain. Publikasi yang pernah beliau terbitkan antara lain *Buku Ajar Komunikasi Antarbudaya* (Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, 2017), “Kerukunan dalam Komunikasi Antarkelompok Agama Islam dan Hindu di Lombok” pada *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 23 No. 1 Juli 2019; “Studi Budaya Nonmateriil Warga Jaton” pada *Jurnal ASPIKOM* Vol. 3 No. 6 Januari 2019; “Analisis Wacana Kritis Kasus Penyerangan Terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik” pada *Jurnal Komunikasi* Vol.10 No. 1 Juli 2018; dan lain-lain.